

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Penyajian dan Analisis Data**

Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian maka pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

##### **5.1.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan Kebijakan ADD di Desa Tatakalai secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Sekalipun masih ada beberapa kendala didalamnya. Hal tersebut diketahui dari fenomena yang penulis temukan selama proses penelitian.

##### **5.1.1.1 Proses Implementasi Kebijakan**

###### **a) Penyusunan Rencana Kegiatan**

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tatakalai terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut:

“Penyusunan rencana kegiatan ADD di desa berdasarkan RAJMDes.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Tatakalai yaitu:

“Kalau perencanaan kegiatan sudah jelas karena di Desa Tatakalai DURKnya sudah tersusun...”(37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Demikian Kepala Dusun Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang sama dengan pernyataan di atas pada wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Semua Desa selain Desa Tatakalai juga sudah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK, juga sesuai dengan keputusan bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ADD Kabupaten Banggai Kepulauan...” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 9 mei 2017)

Menurut Bendahara Desa Tatakalai pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Perencanaan kegiatan ADD desa kami jelaas mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati jadi semuanya disitu.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Tatakalai proses penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik melalui DURK dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **b) Penyelesaian Kegiatan ADD**

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD di Desa Tatakalai para narasumber memberikan jawaban yang sama kepada peneliti bahwa kegiatan ADD yang dilaksanakan di Desa Tatakalai sudah terselesaikan. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara bersama Kepala Desa Tatakalai menyebutkan sebagai berikut:

“Dari yang terlihat sekarang ini semua kegiatan ADD sudah terselesaikan semuanya ya....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai juga menyampaikan pernyataan yang sama dengan apa yang disampaikan Kepala Desa yaitu :

“Kegiatan ADD di Desa Tatakalai ini sudah selesai pelaksanaannya, dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat yang disesuaikan dengan PTO ....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Sedangkan salah satu Kepala Dusun Desa Tatakalai menjelaskan bahwa:

“Sudah selesai semua kegiatan ADD yang dilaksanakan di Desa Tatakalai ini, tapi dalam pelaksanaannya kemarin masih ada

beberapa kendalanya yang buat pelaksanaannya sedikit terhambat....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 9 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagai berikut:

“Kegiatan kami sudah terselesaikan dengan baik dan juga akurat....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ADD yang dilaksanakan di Desa Tatakalai telah terselesaikan dengan baik.

#### **c) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD**

Dalam Pertanggungjawaban kegiatan ADD ada beberapa informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara. Diantaranya yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai sebagai berikut:

“Dalam kegiatan ADD pertanggungjawabannya jelas dibuat LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan disampaikan kepada Bupati,....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai juga memberi pernyataan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai yaitu:

“Kalau gimana pertanggungjawabannya itu, semua kegiatan ADD yang berjalan di Desa ini memang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban, LPJ ini juga dipakai untuk pencairan tahun berikutnya....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Sedangkan Kepala Dusun Desa Tatalalai yang ditemui oleh peneliti menyebutkan bahwa:

“Jelas dibuatkan LPJ juga itu harus karena penting, Pertanggungjawaban kegiatan juga disesuaikan dengan bidang-bidang pelaksana kegiatannya juga tahapan-tahapan SPP pelaksana kegiatan” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Sedangkan Bendahara Desa Tatalalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban kegiatan ADD selalu kita buat dengan baik dan benar.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan ADD terdapat pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk LPJ.

Dari hasil wawancara tentang proses implementasi kegiatan ADD dapat di tarik kesimpulan bahwa proses implementasi

kebijakan ADD di Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari sudah disusunnya rencana kegiatan juga proses penyelesaian ADD yang berjalan lancar dan sudah disusunnya laporan pertanggungjawaban kegiatan ADD yang jelas.

### **5.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Penelitian ini menggunakan model implementasi G. C. Edward III, adapun menurut Edward implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumerdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun pengaruh variabel tersebut terhadap implementasi kebijakan ADD dalam penelitian ini dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

#### **5.1.2.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis di lapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

**a) Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD**

Melihat ada tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh aktor kebijakan kepada pelaku kebijakan tentang kebijakan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan hasil yang sama dari setiap narasumber yaitu adanya pendapat bahwa telah dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan ADD.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tatakalai memberi pernyataan sebagai berikut:

“Sudah ada sosialisasi tentang kebijakan ADD dibuktikan dengan.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai juga mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai yaitu:

“Dari Dinas Kabupaten sudah ada melakukan sosialisasi tentang Kebijakan ADD ini kepada setiap Desa yang ada di Kecamatan Tinangkung Utara, juga Desa yang ada di Kecamatan lain....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ada sosialisasi yang dilakukan yang dibuat kepada para pelaku kebijakan.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Salah satu Honorer di Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Setahu saya sudah ada sosialisasi yang dilakukan, biasanya dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan kalau di Desa biasanya hanya beberapa orang pemerintahan yang diambil untuk ikut sosialisasi....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Salah satu Anggota PKK Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang sama seperti narasumber di atas, yaitu:

“Ada sosialisasi mba, kalau seperti itu biasanya di tingkat kecamatan, kepala desa atau perwakilannya biasanya ikut sosialisasi. Baru setelah itu disosialisasikan lagi ke masyarakat Desa Tatakalai.....” (39 tahun, perempuan, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan Kebijakan ADD dari pihak Kabupaten ke Kecamatan, juga dari pihak Desa telah melakukan sosialisasi ke Masyarakat Desanya.

**b) Kejelasan Komunikasi**

Terkait dengan kejelasan yang disampaikan dari para komunikator atau penyampai pesan kepada para pelaksana kebijakan ADD dan masyarakat. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai:

“Kalau yang saya terima dari sosialisasi yang dilakukan oleh kabupaten sudah jelas semua.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai memberikan pernyataan bahwa:

“Semuanya sudah jelas, semoga yang kita sampaikan lagi ke masyarakat juga jelas semua....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Salah satu Kepala Dusun Desa Tatakalai yang sekaligus pengurus juga mengatakan:

“Sudah jelas semuanya menurut saya ya, karena PTO dan Pemendagri juga sudah menjelaskan tentang kebijakan ADD juga penggunaan Dana ADD....” (38 tahun, Laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang sama yaitu:

“Sudah jelas semua isi yang disampaikan....” (27 tahun, Laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi yang diberikan dari pihak Kabupaten ke Desa, juga dari Desa ke masyarakatnya sudah terdapat kejelasan informasi yang didapatkan perihal Kebijakan ADD.

**c) Konsistensi Pesan**

Konsistensi pesan yang disampaikan, melihat apakah informasi yang disampaikan terkait dengan kebijakan ADD konsisten dan tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai.

“Semua informasi yang disampaikan jelas dan tidak ada perbedaan mba.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai juga menyampaikan hal yang sama, sebagai berikut:

“Tidak ada perbedaan informasi semua sama dengan penjelasan yang diberikan.....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan di atas yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan semuanya sudah sangat jelas.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Kepala Dusun Tatakalai memberikan pendapat sebagai berikut:

“Semua informasi yang kami dapatkan dari kabupaten dan pemedagri kami sampaikan lagi ke masyarakat sesuai dengan apa yang kami terima, jadi tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan.....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Merangkum pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh narasumber maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah terdapat konsistensi pesan/informasi yang disampaikan terkait dengan Kebijakan ADD.

Berdasarkan hasil penelitian fenomena komunikasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam variabel komunikasi ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari intensitas sosialisasi kebijakan ADD, telah dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan ADD dari pihak

Kabupaten ke Kecamatan dan Desa, juga dari Desa ke Masyarakatnya semuanya sudah teraksana dengan baik. Mengenai kejelasan informasi yang didapatkan tentang kebijakan ADD serta bagaimana pelaksanaannya semua sudah jelas terangkum. Dan juga konsistensi informasi yang diberikan tidak ada tumpang tindih satu sama lain, semua informasi yang diberikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi.

#### **5.1.2.2 Sumber Daya**

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangibile*). Dalam proses implementasi variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ataupun sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan beragam tanggapan dari para narasumber.

##### **a) Kemampuan Sumberdaya Manusia**

Melihat bagaimana kemampuan sumber daya manusia pelaksana ADD terkait bagaimana tingkat kemampuan para pelaksana kebijakan ADD tersebut. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Kepala Desa Tatakalai sebagai berikut:

“SDM kami sangat terbatas ya kemampuannya, baik ditingkat pembinanya maupun pengelolanya.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sedangkan Bendahara Desa Tatakalai memberikan jawaban yang sama dengan Kepala Desa Tatakalai yaitu:

“Kemampuan sumber daya manusinya belum memadai apalagi di bidang pendidikan dan tingkat kemampuan para pelaksana belum terbilang baik....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Desa Tatakalai sebagai berikut:

“Tingkat pendidikan belum memadai, apalagi di bidang pendidikan sangat terbatas.....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Sedangkan Sekretaris Desa Tatakalai memberikan jawaban yang berbeda yaitu:

“Rata-rata kemampuan para pelaksana ADD disini sudah cukup baik, meskipun sebenarnya rata-rata pendidikannya SLTP juga ada yang SLTA, tapi pengalamannya sudah banyak ya, sudah berapa tahun dana ADD ini dijalankan.....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD di Desa Tatakalai terhitung belum memadai dan kemampuan para pelaksana kebijakan belum terbilang baik.

#### **b) Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD**

Berkaitan dengan bagaimana fasilitas atau dalam hal ini dana lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan ADD. Dalam hal ini Kepala Desa memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Ada dari pihak ketiga, dan Desa Tatakalai ini memiliki banyak potensi ya, Desa Tatakalai ini adalah lumbung padinya Kabupaten Banggai Kepulauan, kita juga terkenal penghasil cengkeh terbesar di Banggai Kepulauan saya rasa itu sedikit membantu...” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sedangkan Sekretaris Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Keuangan Desa Tatakalai saya yang *handle*, kalau misalkan ditanya dana yang mendukung menurut saya tidak ada ya. Desa sangat membutuhkan dana ADD ini, ini satu-satunya dana yang diharapkan Desa untuk menjalankan pembangunannya....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Salah satu anggota pelaksana kebijakan ADD juga memberikan pendapatnya yaitu:

“Tidak ada dana lain-lain, ini dana ADD ini yang paling diharapkan.....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai juga memberikan pernyataan yang sama yaitu:

“Tidak ada dana lain yang mendukung.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada dana lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan ADD atau pembangunan, dana ADD satu-satunya dana yang sangat besar diharapkan oleh Desa Tatakalai.

Hasil penelitian terhadap faktor sumberdaya manusia peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan sumberdaya manusia para pelaksana kebijakan masih terbilang belum memadai sehingga mempengaruhi pada pelaksanaan kebijakannya.

### **5.1.2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Dalam hal ini tanggapan yang diberikan oleh informan cenderung sama, Selanjutnya tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

**a) Persepsi Pelaksana**

Tentang bagaimana persepsi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan ADD berikut adalah pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Tatakalai:

“Alhamdulillah dapat dana ADD ini terbantu sekali harapannya perlu lagi komitmen yang kuat dalam pembinaannya dan pengelolannya.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sedangkan Sekretaris Desa Tatakalai memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kami sangat terbantu sekali dengan adanya dana ADD ini ya....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Bendahara Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sangat berguna sekali dana ADD ini di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat juga....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Kepala Dusun Desa Tatakalai juga menyatakan pernyataan yang mendukung pernyataan di atas yaitu:

“Kami sangat dibantu sebagai pelaksana kegiatan dengan adanya dana ADD, sangat berguna sekali untuk membiayai kebutuhan desa, baik di dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dll.....”  
(38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi para pelaksana kebijakan dalam menyikapi dana ADD adalah mereka sangat mendukung adanya dana ADD dan sangat merasa terbantu dengan adanya dana tersebut serta mengharap dana ADD terus ditingkatkan.

#### **b) Respon Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan respon pelaksana terhadap kebijakan ADD ini beragam tetapi memiliki maksud yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatalalai sebagai berikut:

“Kami sangat puas dengan adanya dana ADD ini dan sangat terbantu sekali dalam hal hal pembangunan dan juga pemberdayaan.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris Desa Tatalalai sebagai berikut:

“Kepala Desa desa Tatakalai juga tim pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Desa Tatakalai yaitu:

“Kegiatan yang kami lakukan Alhamdulillah berjalan lancar dan transparan....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Kepala Dusun Desa Tatakalai juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Senang ya dapat dana bantuan ADD ini, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik juga lancar dikarenakan ADD di desa kami terbantuan dalam hal pembangunan, pemberdayaan, juga pemerintahan desa.....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa respon pelaksana kegiatan ADD sangat baik karena dana ADD sangat bermanfaat bagi desanya dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan.

c) **Tindakan Pelaksana**

Terkait bagaimana para pelaksana kebijakan membuat kegiatan dan langkah-langkah untuk pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kita melakukan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan rapat musyawarah desa tentang apa-apa yang harus dilakukan dan juga harus mengacu pada PTO dan Pemendagri....”

(40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sedangkan Sekretaris Desa Tatakalai memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sangat banyak yang bisa dilakukan, benerin jalan desa ini, untuk pembangunan desa juga, di tahun 2016 dana ADD lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa lebih ke pembangunan fisik begitu.....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Demikian juga yang disampaikan oleh Kepala Dusun Tatakalai yaitu:

“Banyak tindakan yang sudah dilakukan antara lain, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan memberikan insentif pada beberapa lembaga yang dianggap perlu dalam membantu masyarakat desa diantaranya: Insentif pelayanan posyandu, guru

PAUD/TK, Pegawai SARA/Agama, Lembaga adat, Guru Al-Khairat dan itu semua diluar pemerintahan desa/aparat desa.....”

(38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bendahara Desa Tatakalai adalah sebagai berikut:

“Tindakan yang dilakukan bisa memenuhi semua kebutuhan dan program pemerintah desa sesuai dengan anggaran yang ada.....”

(27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan ADD ataupun oleh pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pembangunan fisik dalam hal pembangunan desa, pendidikan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemerintahan desa, dll.

#### **5.1.2.4 Struktur Organisasi Pelaksana**

Dalam variabel struktur organisasi pelaksana para informan memberikan tanggapan yang senada terhadap struktur organisasi pelaksana lebih jelasnya hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kegiatan ADD ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

### 1) Pembentukan Struktur Organisasi

Berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi dari masing-masing pelaksana ADD. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Tatakalai sebagai berikut:

“Sudah ada struktur organisasinya di desa ini.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Tatakalai yaitu:

“Sudah ada struktur organisasinya, saya rasa semua desa yang menerima dana ADD juga sudah mempunyai struktur organisasi....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Kepala Dusun Tatakalai juga memberikan pernyataan yang senada yaitu:

“Sudah ada, baik struktur organisasi pemerintahan desa maupun tim pelaksana kegiatan dana ADD....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah terbentuk struktur organisasi pelaksana kegiatan ADD.

## 2) Pembagian Tugas

Terkait bagaimana pembagian tugas antar para pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian peneliti Kepala Desa memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pembagian tugas ini sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan pengelolaan ADD....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Kepala Dusun Desa Tatakalai juga memberikan pernyataannya yaitu:

“Kita sudah melakukan pembagian tugas masing-masing pelaksana kegiatan ADD....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Sekretaris Desa Tatakalai memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Tugas pelaksana kebijakan adalah memberikan tugas pengelolaan keuangan ADD kepada KAURnya sebagai pelaksana kegiatan, dan juga dibantu oleh bendahara desa, beserta staf desa, dan aparatur desa lainnya.....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah dilakukan pembagian tugas antar para pelaksana kebijakan semua kegiatan yang dilakukan selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan ADD.

### **3) Koordinasi Para Pelaksana Kegiatan**

Hasil penelitian mengenai koordinasi para pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Tatakalai sebagai berikut:

“Kami selalu melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan soal kegiatan yang kita lakukan, koordinasi dilaksanakan secara *continue* dan berjenjang.....” (40 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 14 mei 2017)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Tatakalai sebagai berikut:

“Ada koordinasi amanlah, karena ini berkaitan dengan proses hukum. Jadi kita juga benar-benar menjalankan kegiatan dengan sebaik mungkin....” (37 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Kepala Dusun Tatakalai juga memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan Kepala Desa di atas yaitu:

“Kami dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan ADD selalu melakukan koordinasi sesama pelaksana kebijakan/kegiatan yang diketuai oleh Sekretaris Desa setelah itu melaporkan hasilnya ke Kepala Desa.....” (38 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 8 mei 2017)

Bendahara Desa Tatalalai juga memberikan pernyataan yang mendukung, yaitu:

“Koordinasi selalu kami lakukan di setiap kegiatan dan koordinasi yang kami lakukan juga berjalan dengan baik.....” (27 tahun, laki-laki, wawancara tanggal 13 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya ada koordinasi yang baik antar sesama pelaksana kebijakan. Koordinator pelaksana kegiatan dalam hal ini diketuai oleh Sekretaris Desa sebagai ketua tim pelaksana kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada pengguna anggaran dalam hal ini yaitu Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa telah dibuat struktur organisasi pelaksana kegiatan dan juga sudah ada pembagian tugas yang jelas antar masing-masing pelaksana kegiatan dan juga selalu melaksanakan koordinasi antar pelaksana. Semua kegiatan yang dilakukan selalu mengacu pada Permendes

Nomor 21 Tahun 2016 sehingga para pelaksana benar-benar melakukan kegiatan sesuai hukum yang berlaku agar tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan dana ADD.

## **5.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

### **5.2.1 Implementasi Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa)**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana Alokasi Dana Desa yang diperoleh digunakan sebagaimana tujuan diadakannya Kebijakan Alokasi Dana Desa. Diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Tahun Anggaran 2015 total jumlah pendapatan Desa Tatakalai adalah sebesar Rp. 720.280.900. Alokasi Dana Desa yang diperoleh sebesar Rp. 429.833.700 lebih dari 50% pendapatan desa diperoleh dari dana Alokasi Dana Desa, maka ADD sangat menunjang peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berikut adalah Penjabaran Rincian Belanja Desa Pertriwulan Tahun Anggaran 2015:

**Tabel 5.1 Rincian Belanja Desa Pertriwulan Tahun Anggaran 2015 Triwulan I**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>
ADD 30 %	Rp. 121,467,000
<b>Pengeluaran</b>	<b>Anggaran</b>
Bid. Pembangunan Desa	Rp. 40,788,000
Bid. Pembinaan Masyarakat	Rp. 5,400,000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 75,279,000
Total	Rp. 121,467,000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatakalai Tahun 2015

**Tabel 5.2 Rincian Belanja Desa Pertriwulan Tahun Anggaran 2015 Triwulan II**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Dana Desa	Rp. 111,373,200	-
Dana ADD	Rp. 50,466,480	-
Jumlah Pendapatan	Rp. 161,839,680	-
<b>Pengeluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 40,675,000	Dana ADD
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 115,014,680	Dana ADD dan Dana Desa
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 6,150,000	Dana ADD
Jumlah Pengeluaran	Rp. 161,839,680	-

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatakalai Tahun 2015

**Tabel 5.3 Rincian Belanja Desa Pertriwulan Tahun Anggaran 2015 Triwulan III**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Dana Desa	Rp. 111,373,200	-
Bagian dari Hasil Pajak	Rp. 4,319,300	-
Bagian dari hasil retribusi daerah	Rp. 61,839,680	-
Alokasi Dana Desa	Rp. 171,933,480	-
Bantuan Provinsi	Rp. 5,000,000	-
Jumlah Pendapatan	Rp. 295,327,880	-
<b>Pengeluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 70,437,800	Sumber Dana ADD
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 194,305,080	Sumber Dana ADD dan Dana Desa
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 11,585,000	Sumber Dana ADD
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 19,000,000	Sumber Dana ADD
Jumlah Pengeluaran	Rp. 295,327,880	-

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatakalai Tahun 2015

**Tabel 5.4 Rincian Belanja Desa Pertriwulan Tahun Anggaran 2015 Triwulan IV**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Dana Desa	Rp. 55,686,600	-
Alokasi Dana Desa	Rp. 85,966,740	-
Jumlah Pendapatan	Rp. 141,653,340	-
<b>Pengeluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 67,685,500	Sumber Dana ADD
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 68,567,840	Sumber Dana ADD dan Dana Desa
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5,400,000	Sumber Dana ADD

<b>Pengeluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
Jumlah Pengeluaran	Rp. 141,653,340	-

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatakalai Tahun 2015

Secara keseluruhan dalam bidang pembangunan dana yang digunakan adalah sebesar Rp.337.409.600 adalah dana berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima. Untuk pembangunan sarana dan prasarana dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 52.873.715. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa di keluarkan dana sebesar Rp. 277.683.000. Program pembangunan jalan desa di keluarkan dana sebesar Rp. 156.946.746. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 47.330.885. Dalam bidang pembangunan implementasi kegiatan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik. terlihat dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa yang telah dilakukan dengan baik.

Dalam bidang pembinaan masyarakat desa dana keseluruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.28.535.000. Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk membina masyarakat desa agar lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa. Seperti kegiatan pembinaan PKK Desa dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000 berasal dari dana Alokasi Dana Desa. Dana yang dikeluarkan untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Rp. 3.600.000. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dana yang

dikeluarkan adalah sebesar Rp.1.000.000. Pembinaan Pelayanan Kehidupan Keagamaan sebesar Rp. 900.000. Pembinaan Posyandu Desa sebesar Rp. 750.000. Pembinaan PAUD Desa dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 9.185.000.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Tatakalai mengeluarkan dana sebesar Rp. 94.279.000. Kegiatan Pelaksanaan BBGRM Desa dananya adalah sebesar Rp.5.000.000, serta pelaksanaan kegiatan lomba di desa dikeluarkan dana sebesar Rp. 89.279.000.

### **5.2.2 Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. George C. Edward (Winarno, 2002) menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hubungan komunikasi dengan implementasi kebijakan ADD, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat.

Beberapa faktor yang mendukung tersebut adalah:

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim kabupaten kepada kecamatan juga ditingkat desa telah dilakukan sosialisasi oleh para pelaksana kebijakan kepada masyarakat desa.

- b. Informasi yang disampaikan oleh para informan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Sudah terdapat konsistensi pesan/informasi yang disampaikan terkait dengan Kebijakan ADD.

Sedangkan faktor penghambat dalam variabel ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dalam sosialisasi kebijakan ADD yang dilakukan di tingkat desa sehingga berakibat kepada kurangnya partisipasi dalam hal pelaksanaan kebijakan. Hanya sebagian masyarakat yang mau diajak ikut bersosialisasi dan mengerjakan pekerjaan bersama.

### **5.2.3 Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan**

Winarno (2002) menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Peran penting sumberdaya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003) sebagai berikut: “Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan hubungan sumber daya dengan implementasi kebijakan terdapat

beberapa faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung adalah sebagai berikut:

- a. Para pelaksana bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Terdapat kelengkapan sarana/prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun faktor penghambat dalam variabel sumberdaya adalah kurangnya kemampuan para pelaksana yang mempengaruhi kepada pelaksanaan kegiatannya, juga kurangnya pendapatan desa yang memadai, sehingga kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **5.2.4 Hubungan Sikap Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (Azra, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait hubungan sikap pelaksana dengan implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para pelaksana kegiatan merespon positif terhadap kebijakan ADD yang diberlakukan
- b. Sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan ADD ataupun oleh pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pembangunan fisik dalam hal pembangunan desa, pendidikan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemerintahan desa, dll.

Sedangkan penghambat dalam sikap pelaksana ini adalah kurangnya respon masyarakat dalam ikut serta terhadap pelaksanaan kegiatan.

#### **5.2.5 Hubungan Struktur Organisasi Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan**

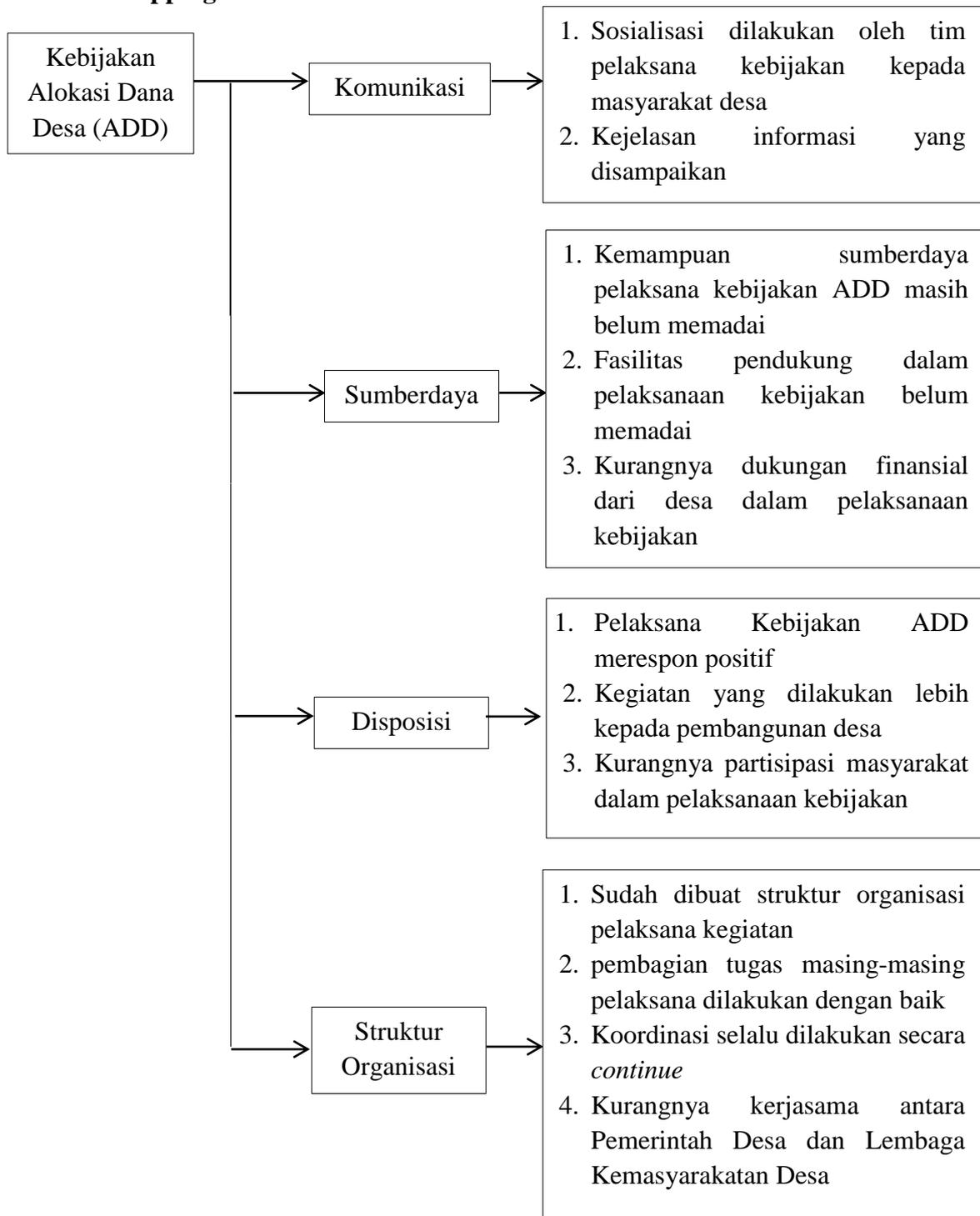
Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila di implementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan (Wisakti, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan hubungan struktur organisasi pelaksana terdapat beberapa faktor pendukung dan juga penghambat dalam variabel ini faktor pendukung tersebut adalah:

- a. Sudah terbentuknya organisasi pelaksana kegiatan ADD, yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab juga Sekretaris Desa sebagai Ketua Pelaksana kegiatan.
- b. Terdapat koordinasi yang baik antar pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat dalam variabel ini adalah sekalipun telah ada pembagian tugas antar masing-masing pelaksana akan tetapi masih ada beberapa anggota pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya.

### 5.3 Mapping



**Gambar 5.1**

Mapping